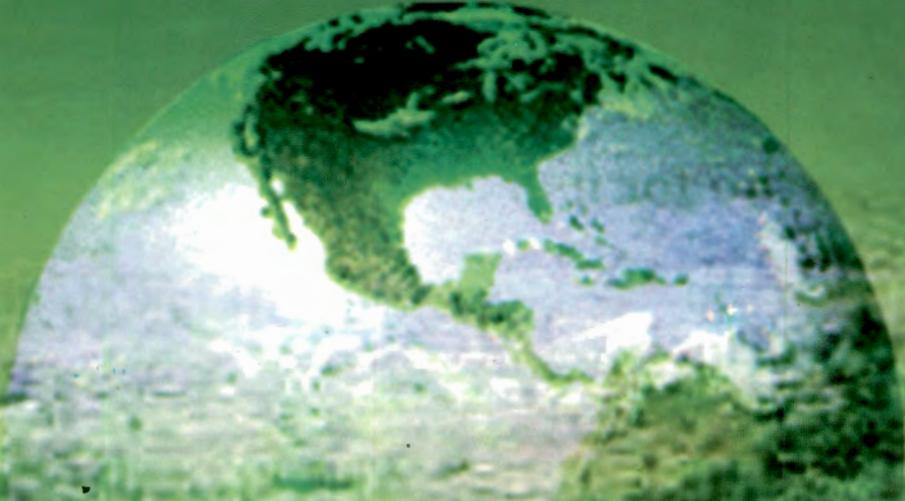


PERKEMBANGAN DAN PELUANG KERJASAMA BILATERAL INDONESIA - IRAN



DEPARTEMEN PERTANIAN



bibli. 341.7 (910:55)

Bibliografi

PERKEMBANGAN DAN PELUANG KERJASAMA BILATERAL INDONESIA – IRAN



341.7 (919.91)
B12
P



(919.91)



DEPARTEMEN PERTANIAN RI

2001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya **Buku Perkembangan dan Peluang Kerjasama Bilateral Indonesia – Iran**. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan tambahan wawasan dalam membangun kerjasama secara bilateral dengan negara tersebut.

Buku kecil ini merupakan kumpulan informasi awal tentang kerjasama bilateral yang berisikan: keadaan umum negara Iran, potensi sumberdaya alam dan pertanian yang dimiliki, perkembangan kerjasama bilateral dengan Indonesia dan peluang kerjasama yang perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang. Buku ini merupakan salah satu judul dari 35 judul Buku Perkembangan dan Peluang Kerjasama Bilateral dan Regional yang disusun oleh Bagian Proyek Peningkatan Kerjasama Luar Negeri, Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian untuk tahun 2001.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang dalam atas kerja keras tim kecil yang telah menyusun 35 judul buku dalam waktu singkat diantara kesibukan tugas sehari-hari.

Kami menyadari keterbatasan data dan informasi yang didapat, analisis yang masih dangkal serta kemampuan membuat narasi dalam kurun waktu yang sangat terbatas. Untuk itu dengan rendah hati kami mengharapkan masukan dari pembaca guna penyempurnaan buku ini pada saat mendatang.

Mudah-mudahan buku ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam menentukan langkah kerjasama bilateral dengan negara Iran.

Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri


Ir. P. Natigor Siagian



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
TIM PENYUSUN	iv
I. KEADAAN UMUM	1
1.1. Sejarah Singkat	1
1.2. Politik dan Pemerintahan	2
1.3. Sosial Ekonomi	9
II. POTENSI NEGARA	11
2.1. Keadaan Geografis	11
2.2. Potensi Alam dan Pertanian	12
III. PERKEMBANGAN KERJASAMA	14
3.1. Kerjasama Bidang Politik	14
3.2. Kerjasama Bidang Ekonomi	16
3.3. Kerjasama Teknik	18
IV. PELUANG KERJASAMA	23
LAMPIRAN	27



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Neraca Perdagangan Indonesia – Iran (dalam jutaan US dollar)	17
1.	Perkembangan Investasi Sektor Pertanian dan Industri Makanan Tahun 1996-2000 Yang Telah Disetujui BKPM	25



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Perkembangan Produksi Serealia dan Umbi-umbian Negara Iran Tahun 1991-1998	13
2.	Perkembangan Luas Areal Tanaman Serealia dan Umbi-umbian Negara Iran Tahun 1991-1998	13



TIM PENYUSUN

- Penasehat** : Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
- Pengarah** : Kepala Bagian Kerjasama Bilateral
Kepala Bagian Kerjasama Regional
- Penanggung Jawab** : Ir. Metralinda Tunus, M.Sc./ Kepala Bagian
Kerjasama Multilateral
- Ketua Tim** : Ir. Iwan Ridwan, MM.
- Anggota** : Drs. Djoko Supono, MM.
Ir. Zulkifli Ali, M.Si.
Ade Chandradijaya, S.TP., M.Sc.
Henny Nurliani, S.Pi.
Budi Supriyono
Yayah Mardianah, SE.
Ir. Juariah
Budiarto
Nunik Ernawatingtyas
Abidan Rajaguguk
Ending



I. KEADAAN UMUM

1.1. Sejarah Singkat

Iran berasal dari kata Aryan yang merupakan salah satu ras Indo-european. Migrasi bangsa Arya dimulai pada 2.500 tahun Sebelum Masehi (SM) ke berbagai belahan bumi seperti ke Asia Kecil dan India. Sejarah Iran yang tertulis mencatat bahwa peradaban di dataran tinggi Iran mulai 600 tahun SM. Pada masa itu terdapat dua kerajaan yakni Parsa di sebelah Selatan dan Medes di Timur Laut Iran. Pada 323 tahun SM, Alexander the Great berhasil menaklukkan Dinasti Achaemenid. Dimasa Dinasti Parthian, Raja Mirthridates II berhasil menjalin hubungan dengan Cina dan Roma yang dikenal dengan perdagangan sutranya (Silk Road). Pada 220 tahun SM, Dinasti Sassanid mengakhiri kejayaan Dinasti Parthian. Setelah peperangan selama 4 abad, seiring dengan memudarnya Kerajaan Romawi, Kerajaan Persia hancur dan diinvasi oleh Kerajaan Mesir dan Arab lainnya dan berhasil menyebarkan agama Islam.

Dari abad 7 hingga abad 16 Masehi, berbagai Dinasti keturunan Arab, Turks dan Mongol saling menguasai Iran yakni Dinasti Abbasid, Dinasti Saffarian dan Dinasti Samanid. Pada abad ke-16 khususnya pada masa Kerajaan Savafid, tercapai masa kejayaan dalam bidang kerajinan dan pembuatan karpet. Pada abad 17 Dinasti Afshar berkuasa, namun kemudian digantikan oleh Karim Khan Zand yang mendirikan Dinasti Zand di Selatan. Di sebelah Utara, Suku Qajar berhasil mematahkan Dinasti Zand dan mendirikan Dinasti Qajar hingga abad 19 dengan Rajanya yang terakhir bernama Ahmad Shah.

Pada tahun 1921, terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Reza Shah Pahlevi yang kemudian menjatuhkan Ahmad Shah dan mengangkat dirinya sebagai Raja Iran. Pada 1941, anaknya bernama Mohammad Reza Shah naik tahta hingga terjadi Revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Imam Khomeini pada 1979. Berbagai peristiwa

menonjol sejak itu adalah pendudukan Kedubes Amerika Serikat, 1979-1981, invasi Irak terhadap Iran pada 1980 yang menimbulkan perang selama 8 tahun (1980-1988) dan sanksi ekonomi Amerika sejak 1996.

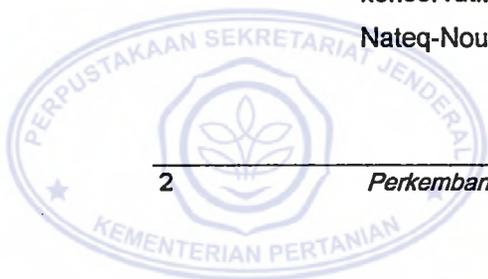
1.2. Politik dan Pemerintahan

a. Sistem Kepartaian

Konstitusi Iran memberikan kebebasan adanya partai-partai politik, namun dalam kenyataannya tidak ada partai politik yang resmi berdiri. Untuk menampung aspirasi politik masyarakat dibentuklah kelompok-kelompok politik yang mewakili kepentingan masing-masing. Seiring dengan meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat, maka perlu tidaknya dibentuk partai politik perlu dibicarakan kembali di kalangan para pengamat, pejabat, intelektual dan media massa. Isu pembentukan partai politik merupakan masalah lama Majelis IV (1992-1996) dan merupakan salah satu program yang belum terlaksana sampai berakhirnya masa jabatan kedua Presiden Rafsanjani (3 Agustus 1997). Baik Presiden Khatami, kelompok moderat, maupun neo-kiri mendukung ide pembentukan partai politik, tetapi kelompok konservatif menentangnya. Mereka khawatir bahwa pembentukan partai politik dengan model Barat akan mengundang menyebarnya oposisi dan terbentuknya kekuatan melawan kelompok konservatif-tradisional.

Kelompok atau perkumpulan politik secara resmi atau tidak, aktif berkecimpung di kancah politik dalam negeri Iran, antara lain :

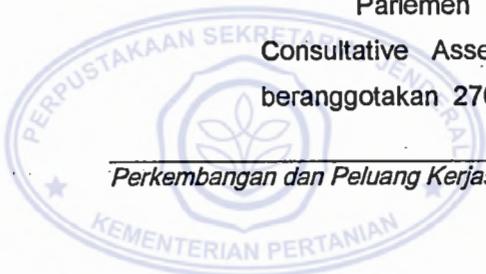
- 1) Jame-e Rouhaniat – e -Mobarez (JRM/ Association of Militant Clergy), kelompok sayap kanan para rohaniawan konservatif yang dipimpin oleh Hojjatoleslam Ali Akbar Nateq-Nouri.



- 2) Majma-e Rouhanioun-e Mobarez (MRM/Society of Combatant Clerics), kelompok neo-kiri para rohaniawan dengan Sekjennya Hojjatoleslam Mehdi Karubi.
- 3) Association for Defending Values of the Islamic Revolution (ADVIR), kelompok rohaniawan kiri keras yang dipimpin oleh Hojjatoleslam Mohammad Mohammadi Reyshahri.
- 4) Group-6 (Servant of Construction of Iran) didukung kuat oleh mantan Presiden Rafsanjani dan beranggotakan para mantan menteri kabinet yang beraliran moderat.
- 5) Kelompok Ansar-e Hizbollah, kelompok religius militan yang dipimpin oleh Hussein Allah-Karam.
- 6) The Islamic Coalition Association yang dulunya bernama Old Islamic Party, pada pemilu Majelis V (Pebruari 1996) berubah menjadi the Islamic Coalition Association sebagai bagian dari JRM. Merupakan partai politik lama yang aktif sejak tahun 1950-an di Teheran dan Qom, dengan Sekjennya Assadollah Badamchian.
- 7) Freedom Movement of Iran (FMI) kelompok yang memiliki prinsip liberal dan merupakan kelompok yang dianggap tidak legal yang dipimpin oleh Ebrahim Yazdi.
- 8) Tudeh Communist Party, partai komunis terlarang.
- 9) Mujaheedien Khalq Organization (MKO), partai oposisi terlarang yang memiliki kedudukan di luar negeri, Baghdad, Paris, London dan Bonn, dipimpin oleh Massoud Rajavi. Kelompok ini selalu mengadakan aksi teror melawan pemerintahan Iran baik di dalam maupun di luar negeri.

b. Parlemen

Parlemen Iran atau Majelis-e Syura-e Islami (Islamic Consultative Assembly) merupakan lembaga legislatif yang beranggotakan 270 orang. Majelis sekarang adalah yang ke-5



sejak berdirinya Republik Islam Iran dengan Ketua Majelis, Hojjatoleslam Ali Akbar Nateq-Nouri. Anggota Majelis dipilih melalui Pemilu setiap empat tahun sekali berdasarkan distrik. Kekuasaan Majelis sesuai konstitusi, walaupun kedudukannya di bawah Presiden namun secara tidak langsung dapat menjatuhkan Presiden dan Menteri-Menteri Kabinet dengan mosi tidak percaya setelah melalui dengar pendapat bila terjadi penyimpangan Konstitusi (Pasal 89).

Dengar pendapat terhadap menteri sekurangnya atas permintaan 10 orang dan menteri yang bersangkutan harus melapor ke Majelis dalam waktu 10 hari sejak permintaan disampaikan. Sedangkan dengar pendapat terhadap Presiden sekurangnya atas permintaan $\frac{1}{3}$ anggota Majelis (90 orang). Kemudian, Presiden melapor ke Majelis dalam waktu satu bulan sejak masuknya permintaan dan menyampaikan penjelasannya. Apabila $\frac{2}{3}$ anggota Majelis mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Presiden setelah acara dengar pendapat tersebut hasil sidang disampaikan kepada Leader untuk melaksanakan haknya seperti disebut dalam Pasal 110 ayat 10 (Hak Memecat Presiden).

c. Sistem Pemerintahan

Kekuasaan pemerintahan berada ditangan Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun, kemudian pemilihan kembali hanya diperbolehkan satu kali. Presiden menjalankan fungsi eksekutif dibantu oleh para wakil Presiden (7 wakil presiden yang masing-masing membidangi masalah-masalah tertentu), anggota kabinet yang terdiri dari 22 menteri dan kelompok penasehat pribadi dan penasehat khusus. Sistem pemerintahan Iran menganut sistem Presidensiil dan Parlementer, dimana anggota kabinet ditunjuk/diangkat oleh Presiden, tetapi harus mendapat kepercayaan dari Majelis serta bertanggung jawab kepada Presiden dan Majelis.

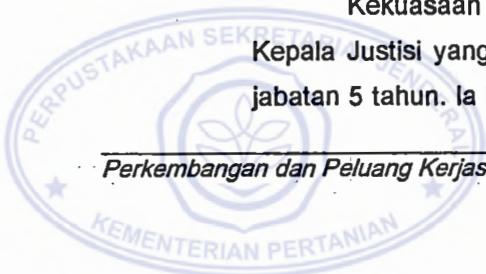


Selain lembaga-lembaga tersebut, di Iran terdapat lembaga-lembaga kekuasaan negara lainnya yang dibentuk melalui pemilu yaitu :

- 1) Dewan Pengawasan Konstitusi (Shura-e-Negahban-e Qanun-e Assasi) yang beranggotakan 12 orang dengan komposisi 6 ahli hukum agama yang ditunjuk oleh Leader dan 6 ahli dari berbagai disiplin ilmu hukum umum yang dipilih oleh Majelis.
- 2) Dewan Darurat Nasional (Majma-e Tashkis-e Maslahat), dibentuk pertama kali dengan fatwa Imam Khomeini pada awal bulan Pebruari 1988, karena adanya perbedaan pendapat antara Majelis dan Dewan Pengawasan Konstitusi. Para anggota Dewan ini berjumlah 20 orang, 18 orang sebagai anggota tetap dan 2 orang anggota tidak tetap.
- 3) Dewan Revisi Konstitusi (Shoray-e Eslah-e Qanun-e Assasi) yang bertugas untuk merumuskan rancangan perubahan konstitusi atas perintah Leader.
- 4) Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (Shoray-e Ali Amniyat-e Melli). Sesuai dengan konstitusi Ketua Dewan ini dijabat oleh Presiden.
- 5) Kepala Badan Penyiaran Radio dan Televisi (IRIB) yang diangkat atau diberhentikan langsung oleh Leader. Radio dan Televisi merupakan alat propaganda dan menduduki peranan penting dan vital bagi cita-cita revolusi Islam. Kepala IRIB kini dijabat oleh Dr. Ali Larijani.

d. Sistem Peradilan

Kekuasaan tertinggi lembaga peradilan dijabat oleh Kepala Justisi yang diangkat langsung oleh Leader untuk masa jabatan 5 tahun. Ia haruslah seorang Mujtahid (Ulama Ahli Fiqih).



Fungsi utamanya adalah mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota Mahkamah Agung dan Jaksa Agung serta menyusun rancangan undang-undang. Kepala Justisi juga mengusulkan calon Menteri Kehakiman kepada Presiden. Kepala Justisi bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan kegiatan lembaga-lembaga Yudikatif, sementara Kementerian Kehakiman mengatur koordinasi antara lembaga Yudikatif dengan lembaga-lembaga Eksekutif dan Legislatif serta bertugas di bidang organisasi pemerintahan dan anggaran.

Sistem peradilan Iran mempunyai dua bentuk peradilan yakni peradilan umum dan khusus. Peradilan umum meliputi Pengadilan Tinggi Pidana, Pengadilan Rendah Pidana, Pengadilan Tinggi Perdata, Pengadilan Rendah Perdata dan Pengadilan Perdata Khusus. Sedangkan Pengadilan Khusus terdiri dari Pengadilan Revolusi Islam dan Pengadilan Khusus Ulama.

Sesuai dengan konstitusi terdapat pula beberapa institusi lainnya yang berada di bawah lembaga Yudikatif seperti : Peradilan Militer yang merupakan bagian dari Lembaga Peradilan yang menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anggota Angkatan Bersenjata, Polisi, dan Pasdaran; Peradilan Tinggi Administrasi yang menangani kasus-kasus yang terkait dengan administrasi pemerintah; dan Kepala Inspektur Negara yang bertugas mengawasi kinerja kementerian-kementerian.

e. Konstitusi

Konstitusi Republik Islam yang disahkan pertama kali oleh Majelis Ahli tanggal 15 Nopember 1979 terdiri dari Pembukaan, 12 Bab dan 175 Pasal. Dengan amandemen pada bulan Juli 1989, maka Konstitusi Republik Islam Iran terdiri dari Pembukaan, 12 Bab dan 177 Pasal. Perubahan tersebut meliputi materi Kepemimpinan (Pasal 15, 107, 109, 110 dan 112), Lembaga Eksekutif (Pasal 60, 113, 124, 130, 133 dan 135),



Lembaga Legislatif (Pasal 85, 88, 89 dan 121), Lembaga Yudikatif (Pasal 91, 157, 160 dan 161) dan TV/Radio (Pasal 175). Sedangkan penambahan dalam konstitusi adalah mengenai Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (Pasal 176) dan Amendemen Konstitusi (Pasal 177). Pasal 176 merupakan penjabaran atau perincian lebih lanjut tugas-tugas Dewan Keamanan Nasional Tertinggi yang tercantum dalam Pasal 110, Konstitusi-1979.

Sekalipun konstitusi dapat direvisi, namun Pasal 177 menekankan hal-hal yang tidak dapat dirubah, yaitu :

- Pasal-pasal yang mencerminkan karakteristik Islam dalam sistem politik.
- Pasal-pasal yang berlandaskan kriteria Islam dan keyakinan beragama rakyat Iran.
- Pasal-pasal yang menunjukkan tujuan dan aspirasi Republik Islam Iran.
- Pasal-pasal yang mengatur sistem Republik Pemerintah Iran termasuk yang berkaitan dengan "Velayat-e Amir" (Pemimpin Republik), pemimpin umat, administrasi pemerintahan yang dihasilkan melalui referendum dan agama resmi negara.

f. Leadership

Kekuasaan rakyat Iran disamping dilaksanakan oleh lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, juga menerapkan doktrin "Velayat-e-Faqih", yaitu kekuasaan tertinggi di tangan ulama. Kekuasaan ulama terjamin dengan dibentuknya Majelis Ahli (Expert Assembly) beranggotakan 83 ulama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu setiap 8 tahun. Berdasarkan Konstitusi, Majelis Ahli memilih Pemimpin Tertinggi Revolusi yang sekaligus sebagai Pemimpin Bangsa Iran (Leader) yang berwenang menerapkan kebijaksanaan umum negara,

mengawasi dan mengendalikan sistem pemerintah Iran. Leader saat ini dijabat oleh Ayatollah Ali Khamenei.

Berdasarkan Pasal 110, Leader memiliki kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut:

- Menentukan kebijakan umum Republik Islam Iran setelah berkonsultasi dengan Dewan Darurat Nasional (National Exigency Council);
- Mengawasi kinerja kebijakan umum;
- Mengeluarkan perintah diadakannya referendum;
- Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata;
- Menyatakan perang, damai, dan mobilisasi umum;
- Mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota Dewan Pengawas Konstitusi, Kepala Justisi, Kepala TV/Radio, Panglima-panglima Angkatan Bersenjata dan Pasdaran;
- Menyelesaikan perbedaan pandangan dan mensekasikan hubungan antar ketiga cabang kekuasaan Eksekutif-Legislatif-Yudikatif;
- Mensahkan pengangkatan Presiden terpilih serta memberhentikannya berdasarkan keputusan Majelis atau setelah diputuskan Mahkamah Agung.

Dasar-dasar kebijakan politik luar negeri Iran seperti tertera dalam Konstitusi, berlandaskan pada penolakan terhadap penggunaan atau penerimaan setiap bentuk dominasi, mempertahankan independensi, integritas teritorial dan perdamaian, mempertahankan hak-hak asasi seluruh bangsa Muslim, tidak bersekutu dengan kekuatan-kekuatan dominan serta menjalin hubungan timbal balik dengan negara-negara yang tidak berperang.

Dalam penerapannya kebijakan luar negeri tersebut juga menentang suatu persetujuan atau kesepakatan apapun yang



akan menimbulkan dominasi asing atas sumberdaya alam dan ekonomi, budaya, militer atau hal-hal lain dari suatu negara.

Republik Islam Iran menghormati kebahagiaan seseorang dalam masyarakatnya dengan mengakui aspirasi dan kemerdekaan, kebebasan dan penerapan hak-hak asasi serta keadilan sebagai hak bagi seluruh bangsa di dunia. Menghindari setiap campur tangan urusan dalam negeri bangsa lain, juga mendukung hak perjuangan suatu bangsa tertindas dari penindasnya di seluruh dunia.

Pemerintah Republik Islam Iran akan memberikan suaka politik kepada siapapun yang mencari tempat perlindungan di Iran dengan perkecualian pengkhianat atau teroris berdasarkan hukum yang berlaku di Iran.

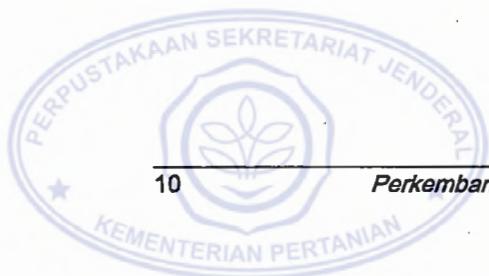
1.3. Sosial Ekonomi

Perekonomian Iran hingga saat ini masih sangat terpengaruh dengan fluktuasi harga minyak di pasar dunia. Lebih dari dua pertiga pendapatan negara masih digantungkan pada sektor tersebut. Hal ini nampak ketika merosotnya harga minyak dunia pada akhir tahun 1997 hingga awal 1999 sangat memukul kemampuan perekonomian Iran. Dengan menurunnya pendapatan pemerintah, maka diambil langkah-langkah diantaranya menunda pembangunan sejumlah proyek, mencari pinjaman dan melakukan penjadualan pembayaran kewajiban luar negeri, serta memperketat kontrol lalu lintas devisa.

Pertumbuhan ekonomi yang sekitar 3,5 - 4% pada tahun 1996-1998 mengalami penurunan pada tahun 1998/1999 menjadi sekitar 1,6%. Akan tetapi pada minggu-minggu akhir kuartal pertama tahun anggaran 1999/2000, Iran mulai dapat memperbaiki kinerja ekonominya akibat meningkatnya harga minyak dunia. Apabila pada tahun 1998 rata-rata harga minyak adalah USD 12,9 maka pada kuartal pertama tahun ini harga rata-rata minyak adalah USD 14,1 yang dapat membantu menekan defisit anggaran pemerintah sebesar USD 700 juta. Kenaikan pendapatan negara dari sektor perminyakan

diperkirakan sebanyak 11 % dan diharapkan dalam tahun anggaran ini dapat meraup USD 11,7 milyar dari penjualan minyak.

Posisi harga minyak yang baik pada tahun ini memberikan dampak yang positif. Pada kuartal kedua tahun anggaran 1999-2000, dengan harga rata-rata minyak Iran diperkirakan sekitar US\$ 18 mengakibatkan penampilan ekonomi Iran cenderung membaik dengan ditandai pula oleh surplus perdagangan yang pada kuartal pertama mencapai USD 754 juta. Menurut laporan Bank Sentral Iran, hutang luar negeri Iran hingga Juni 1999 tercatat USD 13 milyar meliputi hutang jangka panjang dan menengah sebesar USD 7,3 milyar dan hutang jangka pendek USD 5,7 milyar tidak termasuk bunga dan letter of credit. Hutang yang jatuh tempo yang harus dibayar pada tahun anggaran 1999/2000 ini diperkirakan sebanyak USD 5,2 milyar, sedangkan pada tahun 2000/2001 sebanyak USD 3,6 milyar. Sementara jumlah kewajiban luar negeri Iran hingga Juni 1999 secara keseluruhan diperkirakan berjumlah USD 22,3 milyar.



II. POTENSI NEGARA

2.1. Keadaan Geografis

Iran adalah Republik Islam di Asia Baratdaya yang berbatasan dengan Armenia, Azerbaijan dan Turkmenistan (utara), Afghanistan dan Pakistan (timur), L. Arab (selatan), Teluk Persia (baratdaya), Irak dan Turki (barat). Luas negara Iran 1.638.057 km² dan penduduknya berjumlah 59.570.000. Agama resmi yang dianut adalah Agama Islam (99%), kepercayaan lain (Kristen, Yahudi) (1%). Bahasa resmi yang digunakan adalah Persia dan Ibukota Iran adalah Teheran dengan satuan mata uangnya Rial Iran (RIs).

Wilayah Iran dapat dikatakan berbentuk mangkuk. Intinya adalah sebuah plato (900-1500 m) yang hampir seluruhnya dikelilingi pegunungan. Plato ini sebagian besar terdiri dari gurun. Tetapi disekitarnya terdapat cekungan-cekungan yang subur, seperti cekungan Varamin, Qazin dan Khorasan.

Di Iran terdapat tanah rendah di sekitar L. Kaspia dan lereng Pegunungan Elburz yang menerima curah hujan tertinggi, sekitar 2.000 mm di beberapa daerah pesisir. Plato tengah mengalami iklim yang ekstrim, sangat panas dan kering pada musim panas, dingin pada musim dingin, dan bersalju di bagian yang tinggi. Daerah-daerah yang subur di barat laut dan barat banyak menerima hujan dan bersalju sepanjang musim dingin. Sebaliknya, tanah rendah di bagian selatan mengalami iklim panas dengan curah hujan yang rendah.

Iran merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia dengan pendapatan dari hasil minyak mencapai US\$ 102,2 milyar per tahun, atau kira-kira 90% dari pendapatan seluruhnya.

Pertama kali ditemukannya penghasil minyak adalah di daerah Iran Selatan pada tahun 1908. Tetapi sampai tahun 1951, penambangannya masih dikelola Inggris. Dengan diadakannya perjanjian pada tahun 1954. Dalam pelaksanaannya semua

pencarian, penambangan dan pengiriman minyak ke terminal-terminal untuk kegiatan ekspor diserahkan ketangan perusahaan-perusahaan minyak internasional (sebuah konsorsium) yang bekerjasama dengan perusahaan minyak Inggris sebagai perusahaan paling terkemuka; sedangkan perusahaan minyak nasional Iran melakukan pelayanan, pembagian dan pemasaran minyak di dalam negeri, serta melakukan penambangan kedaerah-daerah yang tidak tercakup dalam perjanjian tahun 1954, seperti ladang minyak Naft-e-Shah dan kilang minyak Kermanshah di Iran Barat. Tetapi sejak tahun 1973 telah ditandatangani sebuah perjanjian baru yang menyebutkan bahwa semua pabrik beserta instalasinya menjadi milik pemerintah.

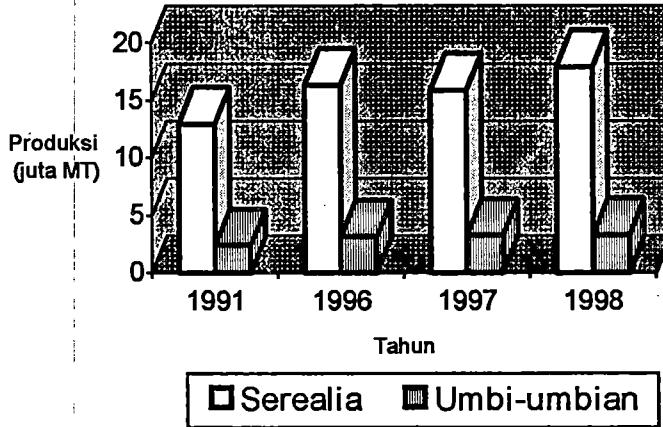
2.2. Potensi Alam dan Pertanian

Sejak tahun 1962, pemerintah memberikan hak kepada semua buruh tani untuk memiliki tanah yang dulunya mereka kerjakan berdasarkan sistem bagi hasil atau untuk memiliki tanah pertanian yang mereka sewa. Mereka juga mendapat pelayanan dari koperasi desa. Untuk kegiatan pertanian yang berskala besar hanya dipegang oleh perusahaan-perusahaan patungan dengan saham dari petani dan oleh unit-unit agro-industry yang dibiayai modal asing.

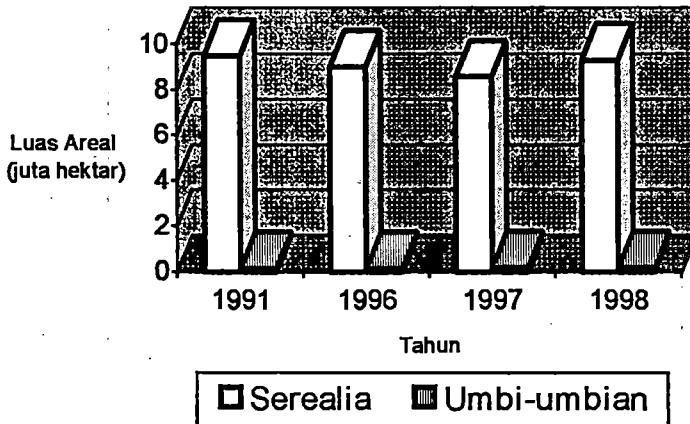
Hasil tanaman utama di Iran adalah gandum, barli (semacam gandum) dan padi, meskipun iklim yang bervariasi memungkinkan pembudidayaan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kecuali gandum, Iran sudah sanggup memenuhi kebutuhan pangan sendiri, dan mengekspor kapas, beras, biji-bijian penghasil minyak, kacang-kacangan, buah-buahan kering dan getah tragacanth (*Astragalus gummifer*)

Perkembangan produksi dan luas areal komoditas sereal dan umbi-umbian di Iran tahun 1991 s/d 1998 dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.





Gambar 1. Data Perkembangan Produksi Sereal dan Umbi-umbian Negara Iran tahun 1991-1998



Gambar 2. Data Perkembangan Luas Areal Tanaman Sereal dan Umbi-umbian Negara Iran tahun 1991-1998

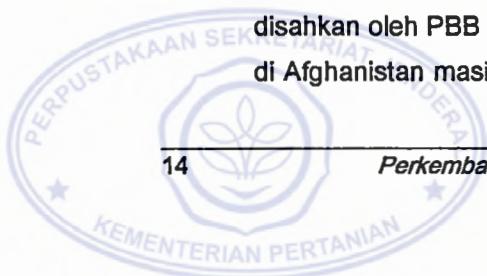
III. PERKEMBANGAN KERJASAMA

3.1. Kerjasama Bidang Politik

Kebijakan dan politik luar negeri Iran di bawah kepemimpinan Presiden Khatami yang menekankan dialog dan detente dengan semua negara telah menunjukkan banyak kemajuan. Perbaikan hubungan dengan negara-negara Teluk Persia ditandai dengan kunjungan Presiden Khatami untuk pertama kalinya sejak Revolusi 1979 ke beberapa negara Teluk termasuk Arab Saudi pada Mei 1999. Pengiriman Dubes PEA ke Teheran pada 6 Pebruari 2000 telah mencairkan kebekuan hubungan Iran dengan PEA yang selama ini terganjal oleh sengketa tiga pulau di Teluk Persia. Begitupun perbaikan hubungan dengan negara-negara Eropa Barat mencapai banyak kemajuan. Kunjungan Presiden Khatami ke Italia dan Perancis serta normalisasi hubungan Iran-Inggris pada Mei 1999 semakin meningkatkan citra luar negeri Iran. Hadirnya kembali berbagai perusahaan minyak Eropa Barat, Perancis, Inggris di ladang minyak Iran telah mematahkan sanksi Amerika Serikat .

Laju perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat yang terus diupayakan melalui saling penajakan oleh kedua belah pihak nampaknya harus terhenti pada level *people to people contact*. Leader Ayatollah Khomeini yang merupakan pewaris kepemimpinan almarhum Imam Khomeini masih keras menolak normalisasi hubungan. Menurut Leader, Amerika Serikat bukan saja telah bertindak tidak adil dan mempropagandakan citra buruk Iran tetapi juga dukungan yang kuat terhadap Rezim Zionis di wilayah Palestina menjadi sebab tidak perlunya normalisasi hubungan dengan AS.

Walaupun berbagai keberhasilan kebijakan hubungan dan politik luar negerinya termasuk kepemimpinannya sebagai Ketua OKI dan gagasannya tentang Dialog antar Peradaban yang juga telah disahkan oleh PBB untuk 2001, hubungan Iran dengan Rezim Taliban di Afghanistan masih buruk. Iran yang mendukung Presiden Rabbani



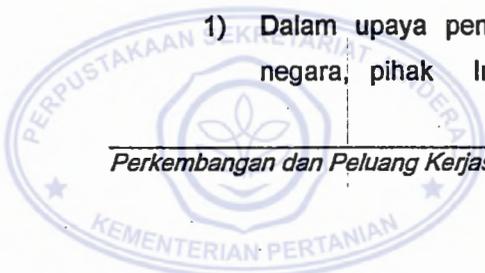
yang terguling tetap menuntut Taliban untuk menghukum penanggungjawab penyerangan terhadap Kantor Konsulatnya di Mazar-i Sharif yang menewaskan diplomat dan wartawannya pada Agustus 1998. Posisi Iran terhadap penyelesaian krisis Afghanistan adalah mendukung pembentukan broad-based government yang menampung semua etnik Afghan.

Hubungan bilateral Iran-Indonesia pada umumnya berjalan dengan baik dan cenderung meningkat. Dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral tersebut, pada 1-4 September 1999, Presiden Iran, Seyyed Mohamad Khatami telah mengirim Mohsen Aminzadeh, Wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) sebagai Utusan Khusus untuk membicarakan peningkatan kerjasama bilateral kedua negara dan juga kerjasama di forum internasional antara lain di dalam OKI, OPEC, dan D-8. Iran sangat menghargai dan selalu mengharapkan peran aktif Indonesia dalam meningkatkan kinerja OKI. Dalam kerangka OPEC, Iran mengharapkan kerjasama yang erat dengan Indonesia dalam upaya menjaga harga minyak di dunia pada tingkat yang "reasonable".

Iran memandang Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar mempunyai posisi yang penting di kawasan Asia Tenggara. Sehubungan dengan krisis yang melanda Indonesia dewasa ini, Iran tetap percaya bahwa bangsa Indonesia akan dapat keluar dari krisis, apalagi dengan telah terbentuknya Pemerintah Indonesia yang baru dan demokratis. Disamping itu Iran juga selalu mengikuti perkembangan dalam negeri Indonesia, dan Iran mendukung tetap utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia (RI). Kunjungan Menlu Iran, Dr.Kamal Kharazi ke Indonesia saat ini adalah dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral terutama di bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan perminyakan.

Forum Konsultasi Politik Bilateral Indonesia - Iran :

- 1) Dalam upaya peningkatan hubungan bilateral antara kedua negara, pihak Iran mengusulkan pembentukan Forum



Konsultasi Politik Bilateral yang dipimpin setingkat Wakil Menlu/Dirjen, disamping Komisi Bersama Tingkat Menteri yang telah ada. Dalam hubungan ini pihak Iran telah menyampaikan draft Persetujuan yang isinya cukup luas yaitu disamping masalah politik juga mencakup masalah-masalah ekonomi, perdagangan, investasi, keuangan, IPTEK dan sosial.

- 2) Pada tanggal 14 Pebrurari 2000, Kedubes Iran di Jakarta menyampaikan usulan draft baru pembentukan Forum Konsultasi Bersama dan kini sedang dipelajari.

3.2. Kerjasama Bidang Ekonomi

Selain anggota PBB, Iran juga merupakan anggota organisasi GNB, OKI, OPEC, Bank Dunia, IMF, WHO, ILO, Kelompok 77 dan badan PBB lainnya. Untuk tingkat regional Iran mempunyai kerjasama ekonomi negara-negara Asia Tengah yakni "Economic Cooperation Organization' (ECO) yang terdiri dari negara-negara Turki, Pakistan, Afghanistan, Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Iran juga anggota D-8 yang terdiri dari Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Turki, Mesir, Pakistan dan Nigeria.

Ekspor Iran masih didominasi oleh sektor minyak, dalam neraca perdagangan Indonesia-Iran 1998 tercatat bahwa ekspor Indonesia ke Iran sebesar US\$ 46,831 juta, impor sebesar US\$ 175,029 juta. Sedangkan dari sekitar 27 komoditas impor Indonesia dari Iran yang volumenya relatif besar diantaranya adalah hasil olahan minyak, minyak mentah, alkohol dan phenol.

Volume perdagangan Indonesia - Iran selama 6 tahun terakhir (1995 - 2000) berfluktuasi. Volume perdagangan tahun 2000 sebesar US\$ 240,22 juta, mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 1999 (US\$ 137,84 juta).



Tabel 1. Neraca Perdagangan Indonesia – Iran (dalam Jutaan US dollar)

Tahun	Ekspor	Impor	Volume	Saldo
1995	132,21	257,02	389,24	124,81
1996	98,89	453,56	552,45	354,67
1997	90,97	444,23	535,21	353,26
1998	45,62	175,02	220,76	129,51
1999	100,54	37,30	137,84	63,24
2000	146,99	93,22	240,22	53,76

Sumber : Badan Pusat Statistik

Ekspor Indonesia ke Iran pada tahun 2000 mencapai US\$ 146,99 juta, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan ekspor tahun 1999 (US\$ 100,54 juta). Sedangkan impor dari Iran pada tahun 2000 sebesar US\$ 93,22 juta, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan impor tahun 1999 (US\$ 37,30 juta).

Komoditas ekspor Indonesia adalah kapal tunda, benang polyester, fluorecent lamp, produk benang ban nilon, benang, staple, fibre, acrylic atau modacrylic, ban dalam karet untuk motor, ban untuk sedan, plywood, pensil hitam, manganese dioxide, baju-baju katun jenis jersey, pullover dan cardigan.

Komoditi impor Indonesia adalah hasil olahan minyak bumi, minyak mentah, alkohol, phenol, buah-buahan segar atau yang dikeringkan, rempah-rempah, pakaian dan barang tekstil bekas, barang-barang aluminium dan hidrokarbon.

Produk-produk yang sangat dimininati oleh masyarakat Iran secara umum adalah : tekstil, kertas, produk plastik, peralatan listrik, bahan kimia, minyak goreng dan peralatan olahraga.

Iran merupakan pintu gerbang arus lalu lintas komoditas Indonesia ke negara-negara Asia Tengah. Letak geografis Iran yang strategis terutama berbatasan dengan negara-negara di Asia Tengah

yang tidak memiliki akses ke laut bebas, menjadikan Iran sebagai negara-negara kunci yang berpotensi tinggi ke Asia Tengah. Sejak dibukanya jalur kereta api Mashad-Tajak (Turkmenistan), Iran memiliki jaringan transportasi darat ke seluruh negara yang relatif kaya tersebut. Mengingat adanya hambatan bagi pemasaran produk-produk Indonesia ke negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika karena selalu dikaitkan dengan isu-isu sosial, HAM, standarisasi, demokrasi dan hak-hak atas karya intelektual. Nampaknya Asia Tengah merupakan pasar potensial yang perlu diterobos para pengusaha Indonesia.

Antara Indonesia dan Iran belum terdapat Persetujuan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal (P4M). Namun kedua belah pihak telah saling menyampaikan draft P4M masing-masing. Hingga 15 Desember 1999, penanaman modal Iran di Indonesia yang telah disetujui BKPM mencapai US\$ 0,3 juta dan terdiri atas dua proyek. Dengan nilai investasi tersebut, Iran menduduki peringkat ke-55 dalam daftar PMA di Indonesia.

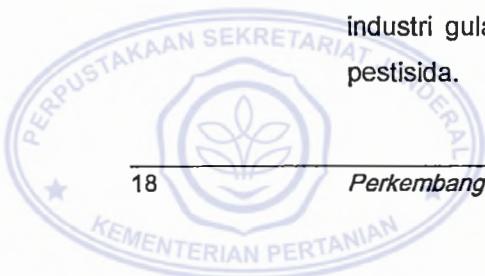
Dalam rangka menarik investasi asing, Indonesia saat ini melakukan berbagai deregulasi di bidang investasi, termasuk pemberian insentif pajak dan kemudahan prosedur penanaman modal.

3.3. Kerjasama Teknik

Untuk meningkatkan kerjasama bilateral telah diadakan beberapa kali Sidang Komisi Bersama Indonesia - Iran antara lain :

- Sidang I Komisi Bersama Indonesia-Iran pada tanggal 4-5 November 1996 bertempat di Gedung Utama, Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Untuk bidang Technical Cooperation khusus mengenai bidang pertanian, telah disepakati antara lain :

- (1) Pertukaran informasi antara kedua negara dalam hal industri gula, minyak goreng, perkebunan, insektisida dan pestisida.



(2) Pertukaran dan pelatihan ekspert dalam produksi kedelai, hortikultura, ternak, dan padi.

Pihak Iran menyampaikan draft usulan kerjasama dibidang kesehatan hewan dan bidang perikanan dalam bentuk MOU.

2. Sidang V Komisi bersama Indonesia – Iran, Teheran, 30 September - 1 October 2000

Di bidang pertanian kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama antara lain minat Iran untuk pengembangan perkebunan tebu dan membangun pabrik gula. Sehubungan dengan itu Indonesia siap untuk bekerjasama dalam bentuk relokasi pabrik gula Palaihari di Kalimantan Selatan. Pabrik ini tampaknya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pihak Iran. Diharapkan hal ini bisa disampaikan oleh Komite Kerja kepada pihak Iran, dan bila berminat dapat dirundingkan secara lebih rinci dalam sidang VI Komisi Bersama.

3. Sidang VI Komisi bersama Indonesia – Iran, Jakarta, 22 – 23 Oktober 2001

Sidang Komisi Bersama Indonesia-Iran VI yang berlangsung pada tanggal 22-23 Oktober 2001 yang didahului Senior Official Meeting (SOM) pada tanggal 19-20 Oktober 2001.

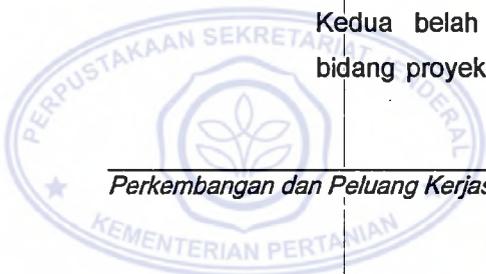
Beberapa catatan yang menyangkut Departemen Pertanian sebagai berikut :

a. Kerjasama di Bidang Perdagangan

Upaya peningkatan volume perdagangan kedua negara antara lain : karet alam, lada, dan dalam bidang agribisnis hortikultura (buah dan sayuran segar), kakao, kopi, jambu mete, minyak kelapa sawit dan kulit katun.

b. Kerjasama di Bidang Investasi

Kedua belah pihak berkeinginan untuk bekerjasama di bidang proyek-proyek kerjasama sektor swasta antar kedua



negara. Dari pihak Indonesia adalah PT. Mesrindo Usama Perindo dan pihak Iran PT. Roghanie Iran Co (Frico). PT. Perkebunan Nusantara XIII berpartisipasi dalam pembangunan industri gula di Iran. PTP Nusantara XIII bersedia bernegosiasi secara detail pada sidang VI di Jakarta.

c. Kerjasama di Bidang Teknik

Kedua belah pihak dapat bekerja sama antara lain :

1. exchange of information in the field of sugar industry, edible oil, and cotton inter-alia between research institutions of both countries.
2. exchange of trainee/expertise on soybean, horticulture, cotton, poultry, husbandry and rice production
3. exchange of expertise and know-how in the fields of pesticide/agriculture related toxic materials as well as biotechnology.

Indonesia menyampaikan proposal kerjasama dibidang peternakan antara lain :

1. exchange of information/experts on animal health
2. training on animal drugs
3. veterinary drugs, livestock and poultry trade

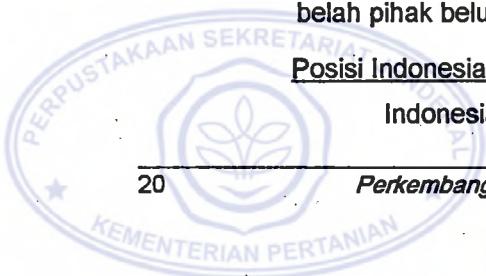
d. Di bawah Sidang Komisi ada Working Group on Services and Technical Cooperation yang membidangi antara lain sektor Pertanian.

Perkembangan :

Kedua pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dibidang pertukaran trainee dan tenaga ahli (pengembangan kedelai, hortikultura, perunggasan dan produksi padi). Kedua belah pihak belum ada yang mengajukan proposal kerjasama.

Posisi Indonesia :

Indonesia menawarkan kerjasama dibidang :



Promosi Pemasaran produk-produk Hortikultura dari Indonesia ke Iran terutama buah-buahan dan sayuran tropis, dan tanaman obat, dengan cara melibatkan pihak swasta dan asosiasi pengusaha swasta.

Pelatihan pengembangan agribisnis hortikultura (terutama pengembangan penanganan pasca panen, pengolahan hasil, packaging, system distribusi dan pemasaran) dalam bentuk on the job training.

Indonesia mengajukan proposal kerjasama Pengembangan Kedelai dan Training produksi padi di daerah tropis, dan mengharapkan agar pihak Iran mengajukan kerjasama yang diinginkannya.

Hambatan-hambatan perdagangan yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan Republik Iran antara lain :

1. Pengaturan ekspor barang ke Iran harus menggunakan kapal Iran sering menimbulkan berbagai masalah pengapalannya.
2. Proses negosiasi sampai mendapatkan order dari pihak Iran berjalan lama karena birokrasi yang ada dan seringnya pergantian pejabat Pemerintah yang menangani proyek-proyek ekonomi, sehingga membutuhkan kesabaran dan keuletan dari pihak pengusaha Indonesia.
3. Pada umumnya harga komoditas Indonesia dinilai agak tinggi oleh importir Iran.
4. Pengusaha swasta Iran pada umumnya sulit untuk mendapatkan jatah devisa dari Pemerintah Iran untuk pembayaran impornya.
5. Iran bersikeras untuk melakukan perdagangan secara normal (tidak menghendaki sistem imbal beli). Hal ini telah menyebabkan keengganan para pengusaha Indonesia Indonesia, mengingat kesulitan Iran dalam cash flow dan



- belum terlunasinya beberapa I/c Iran yang dibuka kepada Indonesia.
6. Pada tingkat pelaksanaan dimana masing-masing pihak lebih bersifat menunggu dan merasa kurang yakin akan kemampuan mitranya. Keraguan kalangan swasta tersebut tampaknya dapat dikurangi apabila pihak Pemerintah dapat memberikan jaminannya terhadap kelangsungan kerjasama yang akan dirintis.
 7. Beberapa contoh kerjasama yang sampai saat ini masih menunggu realisasi adalah dalam bidang pesawat terbang, perkapalan, pembangunan pabrik minyak goreng (kelapa sawit), pabrik kertas dan pabrik tekstil di Iran.
 8. Belum stabilnya kondisi perekonomian dan keuangan Iran sangat mempengaruhi sistem pembayaran luar negeri. Dalam kaitan ini tampaknya perdagangan berdasarkan sistem imbal-beli dapat menjadi alternatif.



IV. PELUANG KERJASAMA

Luas negara Iran 1.638.057 km dan penduduknya berjumlah 59.570.000, Iran penghasil minyak terbesar di dunia dan sebagai pintu gerbang arus lalu lintas yang memiliki jaringan transportasi darat keseluruhan negara.

4.1. Kerjasama Teknik

Dalam bidang pertanian, Iran memegang perusahaan yang berskala besar yang dibiayai modal asing, selain itu Iran sudah dapat memenuhi kebutuhan bahan pangannya sendiri. Iran juga memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan internasional dibidang pertanian.

Kerjasama bilateral dalam bidang pertanian diwadahi dengan MOU yang ditandatangani pada tahun 1987 di Jakarta. Dalam upaya peningkatan hubungan bilateral antara kedua negara, perlu dibentuk forum konsultasi politik disamping komisi bersama yang telah ada; khususnya dalam bidang pertanian. Hal ini karena Iran mempunyai iklim yang bervariasi dan dapat membudidayakan sayur-sayuran serta buah-buahan.

Aktivitas yang perlu dibangun dalam forum kerjasama ini dapat berupa : joint research, exchange information, trust fund/ joint program/project, study visit, appretentive program dan mengintensifkan bilateral talk.

4.2. Perdagangan dan Investasi

Komoditi pertanian negara Iran yang banyak di ekspor ke Indonesia seperti beras, kapas, biji-bijian penghasil minyak, kacang-kacangan, buah-buahan kering dan getah tragacanth.



Nilai ekspor negara Iran ke Indonesia relatif besar, sedangkan nilai impor Indonesia relatif kecil; jadi tidak ada keseimbangan dalam kerjasama pertanian.

Indonesia pada tahun 2000 telah memanfaatkan pangsa pasar Iran terutama komoditas susu dan produk olahannya (US\$ 5,258,770), kopi (US\$ 1,493,346), kakao (US\$ 496,460), teh (US\$ 2,986,952) dan karet alam (US\$ 132,952). Indonesia perlu meningkatkan pangsa pasar pada kelima komoditas tersebut yang merupakan komoditas pertanian di import Iran dalam jumlah besar dan terus menunjukkan peningkatan volumenya dari tahun ke tahun.

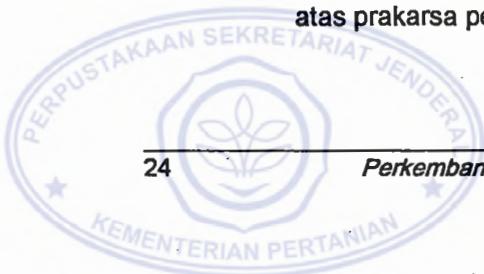
Guna meningkatkan nilai perdagangan kedua negara, jalan yang perlu ditempuh adalah melalui sistem imbal beli (counter trade). Hal ini ditempuh mengingat kelangkaan devisa Indonesia untuk melakukan import, khususnya kebutuhan pangan. Selain itu, Indonesia perlu mempromosikan dan memanfaatkan fasilitas kredit ekspor kepada pihak swasta untuk mendapatkan bahan-bahan seperti : kapas, beras, biji-bijian penghasil minyak, kacang-kacangan, buah-buahan kering dan getah tragacanth.

4.3. Pembentukan Forum Konsultasi Bilateral

Peran Iran dalam forum internasional bidang pertanian dan pandangan simpatik terhadap Indonesia selama ini, perlu dimanfaatkan Indonesia untuk membangun kerjasama internasional bidang pertanian agar lebih banyak lagi manfaat yang didapat sekaligus menempatkan posisi tawar diplomasi Indonesia lebih baik dimata negara lain.

Kerjasama mendatang perlu dilakukan dalam meningkatkan kegiatan promosi produk dan investasi pertanian, melalui :

- a. Mendorong partisipasi perusahaan Indonesia diberbagai "trade fair", baik yang dikoordinir oleh badan resmi pemerintah maupun atas prakarsa perorangan.



- b. Mengadakan temu usaha, seminar dan selling mission diberbagai kota besar di Iran atau di Indonesia.
- c. Meningkatkan kemampuan produksi dan citra pengusaha Indonesia, khususnya mengenai mutu barang, ketetapan waktu penyerahan dan kesinambungan pengiriman barang. Hal ini khususnya perlu dilakukan pada komoditas unggulan Indonesia seperti kakao, makanan ternak dan karet alam.
- d. Perlu dibuka Forum Konsultasi Bilateral untuk meningkatkan kegiatan diplomasi bilateral dengan Iran dan memanfaatkan Iran pada forum internasional dibidang pertanian.

Dalam membangun kerjasama bilateral, Indonesia diupayakan dapat memanfaatkan peluang kerjasama untuk menarik investasi bidang pertanian dari negara partner. Investasi asing di Indonesia dijamin dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan investasi sektor pertanian diatur dengan Keputusan Presiden No. 118 Tahun 2000.

Investasi asing sektor pertanian dan industri makanan yang telah disetujui Pemerintah Indonesia secara umum mengalami peningkatan dan berfluktuasi dari tahun 1996 s/d 2000. Besarnya perkembangan investasi yang telah disetujui BKPM dapat dilihat pada tabel berikut:

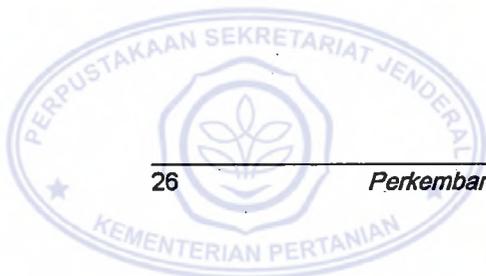
Tabel 2. Perkembangan Investasi Sektor Pertanian dan Industri Makanan Tahun 1996-2000 Yang Telah Disetujui BKPM.

(US\$ Million)

Tahun	Sektor Pertanian				Industri Makanan
	Tanaman Pangan	Peternakan	Perkebunan	Perikanan	
1996	52,2	86,0	1.168,1	79,8	691,4
1997	234,4	1,8	200,4	27,1	572,8
1998	224,4	15,4	725,4	33,0	342,0
1999	80,6	48,3	283,8	69,7	680,9
2000	311,3	18,4	59,1	49,5	701,0



Kerjasama bilateral bidang pertanian pada masa mendatang diharapkan dapat memanfaatkan peluang investasi asing di Indonesia, baik untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Adapun jenis komoditas, bidang investasi dan lokasi yang dapat dipromosikan secara bilateral dalam menarik investasi asing tersebut dapat dilihat pada Tabel Lampiran 3.



Tabel Lampiran 1. PROFIL NEGARA REPUBLIK ISLAM IRAN

1.	Nama resmi	:	Republik Islam Iran (Islamic Republic of Iran)
2.	Ibukota	:	Teheran
3.	Letak	:	25° - 40° LU dan 44° - 64° BT
4.	Perbatasan	:	Utara : Armenia, Azerbaijan, Turkemenistan Selatan : Teluk Oman dan Teluk Persia Timur : Pakistan dan Afganistan Barat : Turki dan Irak
5.	Wilayah	:	1.648.195 km ²
6.	Iklim	:	Mempunyai 4 musim, perbedaan suhu sangat ekstrim. Musim panas sampai 46°C dan musim dingin minus 5°C
7.	Pembagian wilayah	:	Dibagi dalam 24 propinsi
8.	Penduduk	:	62.055.488 jiwa
9.	Bentuk negara	:	Republik
10.	Hari nasional	:	11 Pebruari (Hari Revolusi Islam Iran)
11.	Agama	:	Islam 98% (Shiah 91%, Sunni 7%), Yahudi 0.7%, Kristen 0.7%, Zoroaster 0.1% serta Armenian dan Assyria
12.	Bahasa resmi	:	Parsi
13.	Ekonomi	:	- Sumberdaya alam : minyak bumi, gas alam, batubara, timah hitam, tembaga, biji besi, bahan baku semen, chrom, seng, marmar - Mata uang : Rials (1US\$=3.000 Rials)



Tabel Lampiran 2. SUSUNAN KABINET REPUBLIK ISLAM IRAN

Presiden	:	Dr. Hojjatoleslam Seyed Mohammad Khatami
Wakil Presiden I	:	Dr. Hassan Habibi
Wapres/Kepala Lembaga Lingkungan Hidup	:	Massumeh Ebtekar
Wapres/Kepala Lembaga Pendidikan Jasmani	:	Seyed Mostafa Hashemi Taba
Wapres/Kepala Lembaga Administrasi Kepegawaian	:	Mohammad Baqerian
Wapres/Kepala Urusan Eksekutif	:	Mohammad Hashemi
Wapres/Kepala Badan Perencanaan dan Anggaran Belanja	:	Mohammad Ali Najafi
Wapres Urusan Hukum dan Parlementaria	:	Seyed Abdolwahed Mousavi-Lari
1.	Menteri Dalam Negeri	: Hojjatoleslam Abdollah Nouri
2.	Menteri Luar Negeri	: Seyed Kamal Kharrazi
3.	Menteri Pendidikan Tinggi	: Mostafa Moin
4.	Menteri Ekonomi dan Keuangan	: Hossein Namazi
5.	Menteri Pertanian	: Issa Kalantari
6.	Menteri Jalan dan Transportasi	: Mahmoud Hojjati
7.	Menteri Perminyakan	: Bijan Namdar Zangenah
8.	Menteri Pos, Telegraf, dan Telepon	: Mohammad Reza Aref
9.	Menteri Kesehatan dan Perawatan Medis	: Mohammad Farhadi
10.	Menteri Pendidikan	: Hossein Mozaffer
11.	Menteri Industri	: Gholam Reza Shafe'i
12.	Menteri Pertambangan dan Mineral	: Eshaq Jahangiri

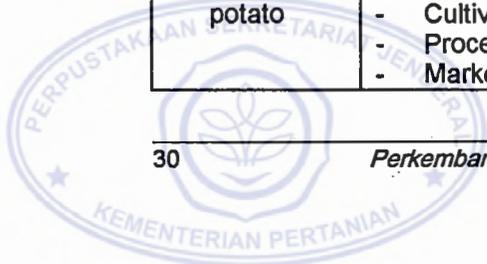


13.	Menteri Koperasi	:	Morteza Haji
14.	Menteri Perdagangan	:	Mohammad Shariatmadari
15.	Menteri Perburuhan	:	Hossein Kamali
16.	Menteri Perumahan dan Perkembangan Kota	:	Ali Abdolalizadeh
17.	Menteri Kehakiman	:	Hojjatoleslam M. Esmael Shoustari
18.	Menteri Pertahanan dan Logistik	:	Ali Shamkhani
19.	Menteri Jihad Konstruksi	:	Mohammd Saeedikia
20.	Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam	:	Ataollah Mohajerani
21.	Menteri Penerangan	:	Hojjatoleslam Qorban Ali D. Najafabadi
22.	Menteri Energi	:	Habibollah Bitaraf



Tabel Lampiran 3. Peluang Investasi Sektor Pertanian di Indonesia

Commodities	Fields of investment	Provinces
Food Crop		
- Paddy/rice	<ul style="list-style-type: none"> - Production input - Seeding - Agric. Machinery service - Marketing - Rice Milling Unit - Processing (rice powder) 	West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Lampung, North Sumatera, West Sumatera, South Sumatera, South Kalimantan, Bali, West Nusa Tenggara Barat.
- Cassava	<ul style="list-style-type: none"> - Marketing - Processing (tapiokca, <i>pellet glucosa</i>, starch, sorbitol, spiritus, dextrin) 	Lampung, North Sumatera, South Sumatera, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, South Sulawesi, East Nusa Tenggara
- Corn	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Marketing - Processing (maize, cooking oil, maizena, ethanol, maize powder, feed, <i>organic acid</i>) 	West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Lampung, North Sumatera, East Nusa Tenggara, North Sulawesi
- Soybean	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Marketing - Processing (tempe, sauce, ketchup, powder, feed, cooking oil, nata de soy) 	West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, south Sulawesi, Lampung, West Nusa Tenggara
- Groundnut	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, South Sumatera, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, West Nusa Tenggara, South Kalimantan, South Sulawesi
- Mungbean	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, North Sulawesi, South Sulawesi
- Sweet potato	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Java,



		Central Java, East Java, Bali, East Nusa Tenggara, South Kalimantan, South East Sulawesi, South Sulawesi, Irian Jaya
--	--	--

Commodities	Fields of investment	Provinces
Horticulture		
- Manggo	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>canned juice, dried fruit, jam, jelly, pickle</i>) - Marketing 	West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Bali, NTB, NTT, South Sumatera, North Sumatera, Lampung, Yogyakarta
- Durian	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Riau, South Sumatera, Lampung, Bengkulu, West Java, Central Java, East Java, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan
- Rambutan (hairy fruit)	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>syrup, dried fruit, canned</i>) - Marketing 	West Java, Central Java, East Java, North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Lampung, Yogyakarta, Bali, South Kalimantan, Central Sulawesi
- Mangosteen	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>canned</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Java, Bali, South Sulawesi, West Sumatera, Riau, Central Java, East Java
- Salacca (snake fruit)	<ul style="list-style-type: none"> - Cultivation - Processing (<i>syrup, dried fruit, canned</i>) - Marketing 	Central Java, Yogyakarta, East Java, North Sumatera, North Sulawesi, South Sulawesi, Bali, NTB, West Java, Irian Jaya
- Orange	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Jambi, West Java, East Java, Bali, NTB, NTT, West Kalimantan
- Banana	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (<i>Powder, chips, puree, jam, wine, syrup, nector, juice, jelly</i>) 	North Sumatera, West Sumatera, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, NTB, NTT, Bali,

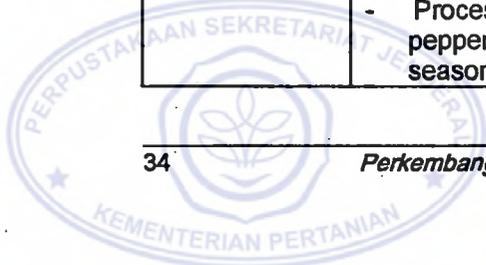
	- Marketing	South Sulawesi, Central Sulawesi, South-East Sulawesi, West Kalimantan
- Potato	- Seedling - Cultivation - Processing (<i>chips, powder</i>) - Marketing	North Sumatera, West Sumatera, Jambi, South Sumatera, West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi
- Cabbage	- Cultivation - Marketing - Processing	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, West Java, Central Java, East Java, Jambi, South Sumatera, Lampung, Bali, South Sulawesi, North Sulawesi
- Chilli	- Seedling - Cultivation - Processing (<i>sauce, paste, powder, chilli oil, dried chilli</i>),	North Sumatera, Riau, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Yogyakarta, South Sulawesi, North Sulawesi, NTB, Bali
- Shallot	- Processing - Marketing	North Sumatera, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, South Sulawesi, NTB, West Sumatera, Lampung
- Carrot	- Cultivation - Processing - Marketing	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, West Java, Central Java, East Java, NTB, Bali, South Sulawesi
- Tomato	- Seedling - Processing - Marketing	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, West Java, Central Java, East Java, NTB, Bali, South Sulawesi
- Orchid and other ornamental plant	- Seedling - Cultivation - Processing (<i>oriental plant : parfume</i>) - Marketing	North Sumatera, Bengkulu, Jambi, West Java, West Kalimantan, East Kalimantan, Irian Jaya, Riau, North Sulawesi, Bali, Yogyakarta, Jakarta
- Medicine plant	- Seedling - Cultivation - Processing (traditional medicine/jamu) - Marketing	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, Lampung, Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java,

		Bali, West Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, South Sulawesi
--	--	--

Commodities	Fields of investment	Provinces
Livestock		
- Cattle	Breeding Fattening Processing (<i>corned beef</i> , sausage, leather industry) Marketing	West Sumatera, Lampung, South Sumatera, Sulawesi, NTB, NTT
- Dairy cow	Breeding Fattening Processing (milk, milk sweet, cheese, <i>yoghut</i>) Marketing	West Java, Central Java, East Java, Lampung
- Poultry	Breeding Cultivation Processing (<i>corned</i> , sausage) Marketing	Java, Lampung, South Sulawesi, East Kalimantan
- Goat	Breeding Fattening Processing (milk, leather, sausage) Marketing	Sumatera, Java, West Kalimantan
- Pig	Breeding Fattening Processing (sausage) Marketing	West Kalimantan, Riau, Islands, North Sumatera, Iarain Jaya

Commodities	Fields of investment	Provinces
Estate		
- Rubber	Seedling Processing (latex, dried rubber, <i>crumb rubber</i> , <i>slab</i>) Marketing	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, South Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi
- Palm oil	Seedling Processing (CPO, <i>palm karnel</i> , <i>sludge</i>) Marketing	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West

		Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi, South Sulawesi, Irian Jaya
- Coffe	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (powder, <i>cofee green</i>, instan <i>coffe</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Bali, NTB, NTT, West Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya
- Cacao	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (<i>cocoa</i>, powder, <i>cocoa cake</i>, fat, <i>shall</i>, <i>pilp</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Lampung, Bali, NTT, Bengkulu, West Java, Central Java, Yogyakarta, West Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya
- Cashew nut	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (fried <i>cashew nut</i>, <i>shell liquid</i>, sweet) - Marketing 	Central Java, Yogyakarta, East Java, Bali, NTB, NTT, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya
- Coconut	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (cooking oil, coconut coal/arang, handy craft) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, Bali, NTB, NTT, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya
- Pepper	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (medicines, pepper powder, seasoning) 	South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Kalimantan, West Kalimantan, South



	- Marketing	Kalimantan, Central Kalimantan, South Sulawesi, South-east Sulawesi
--	-------------	--



BAGIAN PROYEK PENINGKATAN KERJASAMA LUAR NEGERI
BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERTANIAN
2001

